

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
4	Koran Tempo	13.3	16-8-2002

Sumatra Selatan Minta Saham PT Bukit Asam

Ada tidaknya kekhususan Sumatra Selatan untuk membeli saham PT Bukit Asam masih dibahas.

PALEMBANG — DPRD Sumatra Selatan meminta 20-30 persen saham PT Bukit Asam dijual kepada masyarakat provinsi ini jika perusahaan batu bara ini diprivatisasi akhir tahun ini.

"Kita mengharapkan agar 20-30 persen saham tersebut dimiliki oleh masyarakat Sumsel agar ada rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut," kata Ketua DPRD Sumsel Adis Saip, Kamis (15/8).

Menurut dia, saat ini PT Bukit Asam yang berlokasi di Palembang mengalami kemajuan terutama soal transparansi terhadap pemerintah Sumsel. "Seperti soal privatisasi ini mereka juga mengalah-rembuk DPRD."

Direktur PT Bukit Asam Mahbud Iskandar mengaku belum tahu berapa persen jumlah saham yang akan dilepas untuk masyarakat Sumsel sebab masih dalam pertimbangan dan dibahas. "Jadi apakah ada kekhususan untuk

warga Sumsel mendapatkan sekian persen itu masih dibahas," katanya. Dia menambahkan privatisasi Badan Usaha Milik Negara ini akan dilakukan akhir 2002 ini.

Dalam diskusi terbatas soal privatisasi PT Bukit Asam, Rabu (14/8), Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Hasan Zain Mahmud mengatakan, banyak manfaat yang bisa didapat jika privatisasi terhadap perusahaan batu bara ini dilakukan. "Salah satunya dari sisi pajak. Sebab semakin besar dan berkembangnya perusahaan, maka semakin besar pajak yang akan disumbangkan, baik untuk pusat maupun daerah," katanya.

Dia menambahkan, privatisasi perusahaan negara ini merupakan langkah untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan. "Tentu dengan pembelian saham itu diharapkan masyarakat mempunyai rasa memiliki."

Menjawab pertanyaan tentang adanya jaminan tidak akan ada pengurangan karyawan secara besar-besaran jika privatisasi dilakukan, Hasan mengatakan soal pemutusan hubungan kerja tidak ada hubungan sama sekali dengan privatisasi. Persoalan pemutusan hubungan kerja akan

terjadi dengan atau tanpa privatisasi. "Jika privatisasi dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap karyawan, saya pun akan menolak privatisasi."

Tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memiliki saham perusahaan milik negara yang ada di wilayahnya terjadi di berbagai daerah. Di antaranya, Sumatra Barat menuntut bagian atas PT Semen Padang, Sulawesi Selatan menuntut saham PT Semen Tonasa, Kalimantan Timur minta saham PT Kaltim Prima Coal.

Pemerintah Kalimantan Timur menuntut 51 persen saham PT Kaltim Prima Coal yang dilepas. Namun, pemerintah pusat memutuskan untuk membagi 51 persen saham itu menjadi dua: 31 persen untuk pemerintah daerah dan 20 persen untuk pemerintah pusat. DPR yang semula mendukung perjuangan pemerintah Kalimantan Timur, belakangan menyetujui kebijakan pemerintah pusat itu.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Kasyful Anwar kemarin mengatakan perubahan sikap DPR yang semula meminta porsi daerah 41 persen dan pusat 10 persen mendatangkan kecurigaan.

Dia menduga pemerintah pu-

sat mencurigai Kalimantan Timur akan tetap menggandeng PT Intan Bumi Inti Pradana sebagai mitra dalam pembelian saham perusahaan batu bara di daerahnya itu. Intan Bumi diduga akan menggandeng pihak ketiga dari luar negeri, sementara pusat menginginkan proses divestasi

itu tidak melibatkan pihak asing.

Kepala Biro Humas Kalimantan Timur Syafruddin Pernyata mengatakan Indonesia tidak bisa dibangun dan akan kesulitan terus kalau segalanya didasarkan praduga dan prasangka. "Faktanya dulu baru dugaan," ujarnya.

Bupati Kutai Timur Awang Faroek mengatakan dirinya belum mendapat kepastian soal sikap DPR maupun Presiden Megawati Soekarnoputri soal divestasi saham PT Kaltim Prima Coal. "Beberapa hari ini yang kami temui hanya Wakil Presiden dan Menteri BUMN," katanya. ● arif ardiansyah/rusman